

Orientasi Perkembangan Pendidikan Islam Pasca Proklamasi Indonesia

Fauzi Fahmi¹⁾, Firmansyah Firmansyah²⁾

Email: fauzifahmi58@yahoo.com¹⁾, firmanyk@gmail.com²⁾

¹⁾ STAI Raudhatul Akmal Batang Kuis, Sumatera Utara, Indonesia

²⁾ STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Indonesia

Abstract

History revealed that Islamic education in Indonesia has its characteristics and plays a vital role in advancing Islamic culture in Indonesia. This study used a library research method that relies on sources from books and articles in scientific journals. The results showed that after the proclamation, there are four types of Islamic education in Indonesia, i.e., Madrasah, Islamic boarding schools, Public Schools, and Islamic schools. The development of Islamic in Indonesia as a revival, renewal, and enlightenment. The Islamic education system that existed at that time had developed as an effort of implementing Islamic law, so it guarantees and opportunities to continue to exist and develop.

Keywords: *Islamic Education, Post Independence, Indonesia*

Abstrak

Catatan sejarah mengungkapkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dan berperan besar dalam memajukan kebudayaan Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (Library Research) yang bertumpu pada sumber pustaka dari buku dan artikel pada jurnal ilmiah yang berkaitan dengan materi pelajaran. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, terdapat empat jenis pendidikan bagi umat Islam, yaitu: madrasah, pondok pesantren, sekolah pemerintah dan sekolah Islam, perkembangan perubahan Islam di Indonesia sebagai kebangkitan dan pembaharuan dan pencerahan. Sistem pendidikan Islam yang ada pada saat itu dan telah berkembang sebagai upaya dan wujud implementasi hukum Islam sehingga mendapat jaminan dan peluang untuk terus eksis dan berkembang.

Kata Kunci: *Pendidikan Islam, Pasca Kemerdekaan, Indonesia*

Cara Mensitasi Artikel:

Fauzi, F., & Firmansyah, F. (2021). Orientasi perkembangan pendidikan Islam pasca proklamasi Indonesia. *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 83-95. <https://doi.org/10.46963/alliqo.v6i1.262>.

*Corresponding Author:

fauzifahmi58@yahoo.com

Editorial Address: Kampus Parit Enam, STAI
Auliaurrasyidin Tembilahan. Jl. Gerilya No. 12
Tembilahan Barat, Riau Indonesia 29213.

Histori Artikel:

Diterima : 18/12/2020

Direvisi : 22/01/2021

Diterbitkan : 30/06/2021

DOI: <https://doi.org/10.46963/alliqo.v6i1.262>

PENDAHULUAN

Awal mula pendidikan Islam di Indonesia berkesinambungan erat dengan sejarah awal masuknya Islam di Nusantara. Pada catatan sejarah mengungkapkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dan sangat berperan dalam memajukan kebudayaan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam



This Work is Licensed
under (CC-BY-SA)

tersebut diartikan sebagai upaya mewujudkan pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat di Indonesia sejak awal mula Islam datang khususnya pada masa kerajaan. Sejarah pendidikan Islam pada hakikatnya sangat berkaitan dengan sejarah Islam. Oleh sebab itu, periodisasi sejarah pendidikan Islam yang berada dalam periode-periode nilai sejarah Islam itu sendiri.

Sejarah panjang pendidikan Islam di Indonesia setelah kemerdekaan memiliki catatan tersendiri. Pemerintahan pada saat itu pada sistem pendidikan yang dualistis. Pertama, sistem pendidikan Islam yang tumbuh kembang dari masyarakat Islam itu sendiri. Hal ini terbukti dari dua corak yang berbeda yaitu: Sintesis dengan berbagai pola pendidikan yang bervariasi dan menolak segala hal yang berkaitan dengan barat. Kedua, Sistem pendidikan yang diatur oleh pemerintahan Belanda sehingga tidak adanya pengajaran agama di sekolah umum yang sekuler (Idris, 2015).

Pendidikan Islam pada era setelah kemerdekaan masih dianggap sering bertentangan dengan sistem pendidikan yang tumbuh dan berkembang secara terpisah satu sama lain (Sabarudin, 2015). Sistem pendidikan yang pada mulanya dapat dijangkau oleh kalangan atas saja dan pertumbuhan pendidikan secara mandiri pada kalangan masyarakat pada umumnya. Catatan sejarah mengungkapkan bahwa pemerintah mengusahakan untuk menyelenggarakan sebuah sistem pendidikan nasional sesuai dengan perundang-undangan. Berbagai kebijakan dalam sistem pendidikan yang kemudian dipublikasikan oleh pemerintah. Pemerintahan yang berbentuk peraturan pemerintah, undang-undang dan berbagai kebijakan dari menteri pendidikan nasional.

Pendidikan sebagai pilar penting dalam berdirinya sebuah bangsa. Adanya kebijakan pemerintah yang dimulai dari pemerintahan kolonial, awal dan pasca kemerdekaan hingga masa Orde Baru terkesan tidak menghiraukan pendidikan Islam. Hal demikian menyebabkan lembaga pendidikan Islam memiliki berbagai kelemahan yang harus segera disikapi. Kelemahan tersebut diantaranya rendahnya sumber daya manusia (SDM), dana dan manajemen (Kurniyat, 2018). Terlihat dari temuan penelitian sebelumnya bahwa adanya kendala sebuah permasalahan yang

terjadi mulai dari profesionalitas, pembangunan ekonomi, tata kelola, kebutuhan, mutu dan daya saing (Hanipudin, 2019).

Dengan demikian umat Islam belum mampu mengupayakan secara optimal dalam mewujudkan Islam sebagai cita-cita yang dipandang belum mampu mewujudkan ajaran Islam secara transformatif dan lembaga pendidikan Islam masih kurang diminati oleh masyarakat. Kelemahan tersebut dapat diatasi atas perjuangan dan kesabaran masyarakat dan tokoh-tokoh Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis studi kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan kajian sumber bibliografi dari buku dan artikel pada jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan, pembacaan data dengan pemikiran para ahli dengan pendekatan konstruktif dan interpretasi pada isi pokok pembahasan terkait perkembangan pendidikan Islam pasca kemerdekaan..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia

Dinamika lingkup lembaga pendidikan Islam di Indonesia, lembaga pendidikan formal Islam yang saat sekarang dapat dibagi menjadi lembaga pendidikan dasar menengah dan perguruan tinggi. pada tingkat dasar menengah dapat dibagi menjadi kepada tiga jenis yaitu pesantren, sekolah dan madrasah. Pada tingkat perguruan tinggi dibagi kepada dua perguruan tinggi Islam negeri yaitu STAIN/IAIN, UIN dan pendidikan tinggi Islam swasta lainnya yakni universitas/institut Islam swasta serta sekolah tinggi agama Islam swasta (Daulay & Tobroni, 2017).

Pendidik, peserta didik, orang tua atau masyarakat yang menggunakan jasa pendidikan, semuanya adalah bagian penting dari sistem pendidikan. Seperti halnya lembaga yang merencanakan, mengelola dan memproduksi tenaga pendidikan atau disebut dengan Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan disingkat LPTK (Akhiruddin, 2015). Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen bab 1 pasal 1 ayat 14 mengungkapkan bahwa: Adanya lembaga pendidikan dan

tenaga kependidikan merupakan perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program kegiatan pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan mampu menyelenggarakan serta mengembangkan ilmu kependidikan maupun non kependidikan.

Dengan demikian, adanya tantangan yang dihadapi oleh pendidikan Islam pada masa awal masuknya Islam ke Indonesia yaitu memiliki kekurangan dalam memahami ajaran Islam tentang pengetahuan agama. Ketika tersebarnya agama Islam sebagai wujud agama Islam di nusantara membutuhkan para guru, ustaz dan pendakwah untuk mengajarkan prinsip ajaran agama baru tersebut. Pendidikan Islam tersebut mulanya dalam bentuk padepokan atau pesantren ini berlangsung sangat lama hingga pada akhirnya timbul tantangan baru yaitu munculnya sekolah Belanda yang didirikan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Pendidik dan pekerjaannya pun langsung dari negara mereka guna menghasilkan tenaga kantor tingkat rendah dan memiliki gaji yang jauh lebih murah.

Tujuan mereka untuk menghasilkan pekerja kantor, maka kurikulum yang digunakan disekolah tentu saja keterampilan dasar yang diperlukan untuk menunjang pekerjaannya (Tengku Sarina Aini Tengku Kasim, 2015). Sesuai tradisi masyarakat Belanda yang sekuler, sekolah ini tidak memberikan pendidikan agama kepada siswanya. Adanya sekolah Belanda ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan penduduk muslim kala itu. Ada yang melihat beberapa manfaat dari sekolah Belanda ini. Metode pembelajarannya lebih efektif, dan alat yang digunakan dalam bantuan mengajar pun dianggap memudahkan siswa dalam belajar. Namun sebagian lagi berpendapat bahwa kendati ada kelebihan-kelebihan, model sekolah seperti ini dianggap produk pemikiran orang kafir dan tidak pantas ditiru karena dengan cara meniru-niru cara orang kafir dikhawatirkan akan membuat seseorang menjadi kafir juga. Pada saat bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945.

Pasukan umat Islam menuntut guna pendidikan agama Islam diberikan di sekolah pemerintahan. Persaingan politik antara kelompok santri dan abangan telah membuat pendidikan agama disekolah pemerintah yang baru lahir ini berstatus

fakultatif sampai tahun 1966. Pada tahun 1966 terjadi perubahan yang signifikan pada pelaksanaan pendidikan agama di sekolah negeri. Masyarakat Orde Baru saat itu beranggapan bahwa pendidikan agama diperlukan untuk mengikis habis paham komunis.

Adanya perkembangan dari tahun ke tahun muncul pada tahun 1975 dengan keluarnya SKB 3 Menteri yang menyamaratakan ijazah sekolah dengan ijazah madrasah yang memiliki syarat bahwa kurikulum madrasah harus 70% pendidikan umum yang diajarkan di sekolah. Sementara masyarakat yang beragama Islam menginginkan anak mereka yang awalnya belajar di madrasah dapat dipindahkan ke sekolah umum guna mendapatkan pendidikan umum yang dianggap penting untuk memperoleh pekerjaan masa mendatang.

Sesuai dengan perkembangannya bahwa kemajuan bangsa jumlah sekolah dan madrasah semakin banyak hingga jumlah lulusan madrasah semakin banyak pula. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa secara nasional sampai saat ini kebanyakan lulusan madrasah masih kalah jika dibandingkan dengan lulusan sekolah pendidikan umum. Pada saat Undang-Undang terkait Sistem Pendidikan Nasional tersebut direvisi tahun 2003 kala itu, letak pendidikan Islam di sekolah ini tidak mengalami perubahan.

Dengan demikian, sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia, terdapat empat macam pendidikan bagi umat Islam di Indonesia guna mendapatkan pendidikan agama. Adapun empat macam pendidikan tersebut antara lain madrasah, pondok pesantren, sekolah pemerintah dan sekolah Islam (Bafadhol, 2017). Namun, banyak pengamat pendidikan Islam yang tidak mencantumkan sekolah pemerintah tersebut dalam lembaga pendidikan Islam.

Kejayaan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia

Lembaga pendidikan Islam di Indonesia memiliki keadaan yang masih ditandai oleh berbagai kekurangan meliputi: a) lembaga pendidikan tinggi Islam masih belum dapat memberikan secara optimal dalam mewujudkan Islam yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. b) adanya kelemahan sumber daya manusia (SDM), dana dan manajemen. Sementara itu, ketika suatu lembaga pendidikan ingin berada dalam puncak popularitas secara fungsional dalam kehidupan yang

multikultural harus didukung oleh hal tersebut (Abdullah, 2013). c) lembaga pendidikan tinggi Islam dipandang belum mampu mewujudkan Islam secara transformatif. d) Kecenderungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat madani yang kuat seperti masyarakat yang menunjang tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan e) Lembaga pendidikan tinggi Islam, bahkan juga pada lembaga pendidikan Islam yang ada dibawahnya, kurang diminati oleh masyarakat. Masyarakat pada umumnya lebih memilih sekolah pada lembaga pendidikan yang tidak menggunakan simbol Islam (Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016).

Pendidikan Islam di Indonesia, seperti pada bagian Islam lainnya berjalan menurut rentak gerakan Islam pada umumnya seperti pendidikan, budaya, politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya (Herman, 2013). Pada permulaan abad ke 20 terjadi beberapa perubahan dalam Islam di Indonesia secara garis besarnya dapat digambarkan sebagai pembangkitan dan pembaharuan serta pencerahan.

Bentuk usaha penyiaran agama Islam pasti memiliki rintangan dan hambatan, gangguan bahkan ancaman yang berat. Pengembangan dan penyiaran agama Islam termasuk paling dinamis dan begitu cepat dibandingkan dengan agama-agama yang lainnya (Drajat, 2018). Hal demikian diukur dengan kurun waktu yang sebanding dan dengan sikon alat komunikasi dan transformasi yang sepadan. Catatan sejarah telah membuktikan bahwa Islam dalam waktu 23 tahun dari kelahirannya yang sudah menjadi tuan di negerinya sendiri yaitu Jazirah Arabia.

Munculnya dorongan yang kuat guna mengadakan perubahan pendidikan berasal dari golongan Salaf yang menolak taklid yang dengan sendirinya berarti menekankan pentingnya berbahasa Arab sebagai jalan untuk kembali kepada Alquran dan Sunnah. Namun dalam praktik perubahan hanya berlaku dengan perubahan didaktis dan metodik yang dipinjam dari Barat.

Konferensi pendidikan Islam internasional telah merumuskan pembagian ilmu tersebut kepada dua macam, yakni ilmu yang bersumber dari wahyu yang disebut dengan *perennial knowledge* dan ilmu yang bersumber dari usaha dan perolehan manusia yang disebut dengan *acquired knowledge*. Ilmu yang tergolong dari kelompok pertama antara lain: 1) Alquran, 2) subjek tambahan metafisika

Islam dalam ekonomi. Kelompok kedua antara lain: 1) imajinatif, 2) sains intelektual 3) ilmu-ilmu kealaman, 4) sains terapan mekanika.

Pada periode perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Baru mengalami perkembangan tahap demi tahap yang begitu signifikan. Mulanya lembaga yang berciri khas pesantren mulai mendirikan madrasah dalam proses sistem pendidikannya. Pada sistem tersebut jenjang pendidikan terbagi menjadi madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah. Sistem pendidikan madrasah ini mendorong adanya perkembangan pesantren sehingga jumlahnya meningkat begitu pesat. Pada awal tahun 1958/1959 lahirnya Madrasah Wajib Belajar yang memiliki kewajiban dan hak seperti sekolah negeri. Berikutnya, pada tahun 1965, berdasarkan rumusan Seminar Pondok Pesantren di Yogyakarta adanya kesepakatan dari pondok pesantren yang perlu dimasukkan pelajaran keterampilan misalnya arsitektur dan pertanian.

Selain madrasah ketiga tersebut, pondok pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan Nasional di Indonesia juga merupakan bagian integral dari lembaga keagamaan begitu unik memiliki potensi yang berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya (Kamarul Azmi Jasmi, 2011). Hal demikian dapat dipahami bahwa eksistensi pondok pesantren yang menegaskan bahwa dari segi manajemen dan pengelolaannya bersentuhan langsung dengan pendekatan keagamaan. Hal demikian berkaitan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional meliputi beberapa pasal yang menekankan penyelenggaraan pendidikan keagamaan di Indonesia.

Pendidikan keagamaan tersebut yang dimaksud ialah pondok pesantren sebagaimana yang diatur dalam PP No. 55 pada pasal 26 ayat (2) yang menyelenggarakan pendidikan diniyah pada tingkat dasar dan menengah. Selain itu, berdirinya pondok pesantren yang tujuannya guna menciptakan insan yang taqwa serta komponen lainnya sebagai manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan merupakan indikator utama mengenai peran pesantren dalam bagian sistem pendidikan Nasional di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari segi kontekstualisasi UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, pada bab II terkait “Dasar, Fungsi dan Tujuan” di mana UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 tersebut, terdiri dari

dua pasal yakni pasal 2 dan 3 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 no 19, n.d.).

Lembaga pendidikan Islam yang efektif merupakan lembaga pendidikan yang dapat merealisasikan konsep kurikulum pendidikan Islam dengan seutuhnya. Ada beberapa lembaga pendidikan Islam yang ada saat ini yang dapat dijadikan alternatif sepanjang lembaga tersebut dapat merealisasikan konsep kurikulum pendidikan Islam antara lain:

1. Merancang program seluruh aspek-aspek kurikulum dalam pendidikan Islam
2. Merencanakan proses sinergi antara ilmu agama Islam dengan ilmu ajaran umum dan diprogramkan suasana Islami baik dari bentuk ibadah, pakaian dan sebagainya yang melambungkan iklim keislaman dalam kehidupan sehari-hari.
3. Merancang materi khusus bidang studi ilmu agama memungkinkan peserta didik memiliki landasan ilmu agama untuk bisa dikembangkan ke dalam tingkat yang lebih tinggi atau untuk terjun ke masyarakat yang lebih luas. (Sya'adah, Saputra, Jannah, & Mahfud, 2019).

Pendidikan Islam Pada Era Kemerdekaan

Lembaga Pendidikan Islam secara formal telah diintegrasikan kepada sekolah sejak tahun 1946, sejak dimulainya pelajaran agama pada sekolah umum. Pada akhirnya tercantum dalam Undang-Undang Dasar No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan adanya undang-undang tersebut, posisi pendidikan Islam sebagai bagian sistem pendidikan nasional semakin efektif dan efisien, baik pada lingkup lembaga pendidikan umum maupun bidang keagamaan.

Ketika dilihat berdasarkan dari undang-undang tersebut bahwa perhatian pemerintah terhadap pendidikan agama Islam sudah relevan pada lembaga tersebut telah disetarakan dengan sekolah umum sehingga tidak ada lagi terdapat perbedaan antara lembaga yang satu dengan lembaga pendidikan Islam lainnya. Salah satu bukti bahwa Pendidikan Islam sudah mendapat perhatian pemerintah, dapat dilihat dari pengaruh ide pembaharuan yang berkembang pada dunia Islam dan kebangkitan bangsa Indonesia, proses demi proses pelajaran umum masuk dalam kurikulum madrasah (Nursyarief, 2014). Buku pelajaran agama Islam juga mulai disusun khusus sesuai dengan tingkatan madrasah.

Selanjutnya ketika keadaan tersebut berbeda ketika dengan politik pendidikan Islam pada masa Orde Baru yang dimulai tahun 1966. Pada mulanya umat Islam amat berharap kepada Pemerintahan Orde Baru agar memperhatikan segala bentuk nasib pendidikan Islam (Islam Pasca Orde Baru, 2016). Namun, harapan tersebut yang juga belum terwujud sebagai akibat dari kebijakan politik Pemerintahan Orde Baru yang terkadang kurang sejalan dengan keinginan umat Islam pada kala itu.

Ada beberapa karakteristik Pemerintah Orde Baru yang kurang kondusif bagi pengembangan pendidikan Islam. Dalam hubungan ini paling kurang ada lima karakteristik Pemerintahan Orde Baru antara lain: a) Pada era pemerintahan Orde Baru sebagai pemerintahan yang sangat dominan dan kuat. b) Masa pemerintahan Orde Baru dipimpin langsung oleh kekuatan militer yang bekerja sama dengan aparat teknokrat dan birokrat sipil, c) Pada pemerintahan Orde Baru melengkapi diri dengan pihak aparat keamanan represif serta aparat politik-ideologis guna melestarikan dan memproduksi kekuatan, d) Pada pemerintahan Orde Baru mulai sejak awal kebangkitan telah mendapatkan dukungan dari kapitalisme internasional dan e) Pemerintahan Orde Baru sudah mengalami instabilitas (Maghfuri, 2020).

Tipe Pemerintah Orde Baru sedemikian itu sehingga pada akhirnya menjadikan masyarakat sangat lemah baik dalam bidang ekonomi, politik, bahkan budaya apalagi dalam bidang keamanan. Masyarakat tidak memiliki nilai yang cukup kuat di hadapan pemerintah. Masyarakat seakan dikebiri dalam setiap berbagai aktivitasnya. Pemikiran masyarakat yang kurang berkembang khususnya menjadikan sedikit berbeda dengan ideologi atau paham pemerintah.

Pemikiran pendidikan agama Islam pada periode Indonesia merdeka diwarnai dengan model pendidikan dualistis antara lain: (1) sistem pendidikan dan pengajaran pada sekolah umum yang sekuler, tidak adanya mengenal ajaran agama, yang merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda. 2) sistem pendidikan dan pengajaran Islam yang ketika tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Islam, baik yang bercorak isolatif-tradisional maupun yang bercorak sintesis dengan adanya berbagai variasi pola pendidikannya (Haryanto, 2016).

Sistem pendidikan agama Islam yang ada pada saat itu dan telah berkembang sebagai salah satu usaha dan bentuk pelaksanaan syariat Islam sehingga

mendapatkan jaminan dan kesempatan untuk tetap eksis dan berkembang, serta memperoleh perhatian dan bantuan dari pemerintah. Pada ajaran agama Islam bahwa pendidikan merupakan bagian sangat holistik dari keseluruhan tugas ibadah dan kepemimpinan manusia terhadap Allah Swt. yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Adapun beberapa lembaga pendidikan pada masa Orde Baru antara lain:

1. Pesantren

Pesantren pada dasarnya merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki ciri khas khusus dalam program kurikulumnya (Herman, 2013). Didalamnya meliputi pendidikan ilmu agama dan mampu mewujudkan nilai keislaman dalam kehidupan kesehatan. Pesantren dibagi menjadi dua macam yaitu pesantren salaf dan pesantren khalaf. Pesantren salaf masih terikat pada tradisi lama seperti kitab klasik dan non klasikal. Sedangkan pesantren khalaf merupakan pesantren yang telah dimodernisasi yang dilihat dari segi sistem, kurikulum dan manajemen.

2. Sekolah

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang memusatkan pada pengetahuan yang dikembangkan ialah pengetahuan umum. Adanya pendidikan formal di sekolah merupakan pengembangan pendidikan yang telah diberikan oleh orang tua terhadap anak mereka dalam keluarga. Dengan demikian bahwa proses pendidikan yang ada di sekolah merupakan bagian dari pendidikan dalam keluarga. Selain itu, kehidupan yang ada di sekolah merupakan jembatan bagi anak mereka yang menghubungkan kehidupan dalam keluarga dalam lingkup masyarakat.

3. Madrasah

Berdirinya madrasah di Indonesia begitu populer ketika pada abad ke-20 (Drajat, 2018). Kehadiran madrasah memberikan warna religius bagi masyarakat Islam sebagai lembaga pendidikan dilatarbelakangi dengan munculnya semangat pembaharuan lingkup pendidikan Islam di Indonesia. Madrasah sebagai wujud lembaga pendidikan yang muncul setelah pesantren dan sekolah mengadopsi sebagian sistem pendidikan pesantren dan sekolah.

4. Perguruan Tinggi Islam

Perguruan Tinggi Islam di Indonesia telah berdiri dan mulanya pertama kali Jakarta pada bulan Juli Tahun 1945 yang bernama Sekolah Tinggi Islam (STI). Berikutnya pada tahun 1946 Sekolah Tinggi Islam tersebut dipindahkan ke Yogyakarta dan pada tahun 1948 STI berubah nama menjadi Universitas dengan adanya nama Universitas Islam Indonesia (UII) yang empat fakultas Pendidikan, Agama, Ekonomi dan Hukum. Selanjutnya pada tahun 1950 Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia menjadi negeri sehingga menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIN).

Lebih lanjut PTAIN yang terdapat di Yogyakarta diintegrasikan dengan Akademi Dasar Ilmu Agama (ADIA) yang terdapat di Jakarta menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada tahun 1960. Mulai dari tahun 1960 sampai tahun 1973 IAIN telah berkembang sejumlah 14 perguruan tinggi. Kemudian pada tahun 1997 fakultas yang ada di IAIN lokasinya berada di luar IAIN induknya maka dijadikan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN). Oleh karena itu, mulai sejak tahun 2002 beberapa IAIN telah berubah menjadi Universitas Islam Negeri (Soni Akhmad Nulhaqim, R. Dudy Heryadi, Ramadhan Pancasilawan, 2015).

Pendidikan Agama Islam semakin kuat kedudukannya setelah masuk ke dalam sistem pendidikan nasional yang telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 1989 yang selanjutnya diatur pada serangkaian peraturan pemerintah yang berkenaan dengan pendidikan sehingga dilanjutkan dengan diberlakukannya UU No. 20 Tahun 2003. Dengan demikian untuk mengukuhkan eksistensi pendidikan Islam di Indonesia maka adanya usaha lebih maju adalah bagaimana mengembangkan dan memberdayakannya.

Berkaitan dengan adanya pengkajian pendidikan yang lebih mendalam sangat diperlukan. Dengan adanya proses kajian yang lebih merinci guna memperoleh visi dalam menatap masa depan yang baik dalam lingkup pendidikan Islam dan mampu mengaplikasikannya dalam lingkup pendidikan Islam di Indonesia yang lebih eksis hingga kapan pun.

KESIMPULAN

Pendidikan Islam di Indonesia setelah reformasi mengalami lika-liku menuju kejayaan. Dengan adanya perseteruan antara kelompok Islam, nasional dan lainnya yang masing-masing memiliki paradigma tersendiri pada visi dan misi mereka guna menjadikan negara Indonesia menjadi negara Islam yang Pancasila. Ketika munculnya masalah tersebut, maka adanya pergerakan partai politik dan pemberontak yang dibuat oleh kelompok Islam. Hal demikian menyatakan bahwa Islam begitu kecewa dengan hasil keputusan presiden kala itu yang menjadikan dasar negara Indonesia sebagai negara Pancasila.

Proses perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia pasca kemerdekaan sangat memiliki perubahan pesat, karena pemerintah memberikan peluang besar dengan menyinergikan antara sekolah umum dan sekolah Islam sehingga sekolah Islam tidak mengalami kemunduran dan memiliki kejayaan dan tetap eksis hingga masa revolusi industri saat ini dan masa mendatang.

REFERENSI

- Abdullah, A. (2013). Pendidikan Islam sepanjang sejarah: Sebuah kajian politik pendidikan di Indonesia. *SUSURGALUR: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah*, 1(2), 213-228. <https://doi.org/10.2121/susurgalur.v1i2.68>
- Akhiruddin, K. (2015). Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara. *Tarbiya: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 1(1), 195-219. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jurnal-tarbiya/article/view/143>
- Bafadhol, I. (2017). Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(11), 59-72. <http://dx.doi.org/10.30868/ei.v6i11.95>
- Daulay, H. P., & Tobroni, T. (2017). Islamic education in Indonesia: A historical analysis of development and dynamics. *British Journal of Education*, 5(13), 109-126.
- Drajat, M. (2018). Sejarah madrasah di Indonesia. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 1(1), 192-206. https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v1i1.17
- Hanipudin, S. (2019). Pendidikan Islam di Indonesia dari masa ke masa. *Matan: Journal Of Islam And Muslim Society*, 1(1), 39-53. <https://doi.org/10.20884/1.matan.2019.1.1.2037>
- Haryanto, B. (2016). Perbandingan pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia. *Adabiyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 81-98. <https://doi.org/10.21070/ja.v1i1.166>

- Herman. (2013). Sejarah Pesantren Di Indonesia. *Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 6(2). 145-158. <http://dx.doi.org/10.31332/atdb.v6i2.311>
- Idris, S. (2018). pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. *KREATIF: Jurnal Studi Pemikiran Pendidikan Agama Islam*, 13(2), 148-165. <https://doi.org/https://doi.org/10.52266/kreatif.v13i2.90>
- Kurniyat, E. (2018). Memahami dikotomi dan dualisme pendidikan di Indonesia. *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan*, 14(1). 1-19. <http://dx.doi.org/10.31000/rf.v14i1.669>
- Maghfuri, A. (2020). Manajemen sinergis pesantren-madrasah di era modern sebagai alternatif pendidikan Islam Indonesia. *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, 6(1), 51-71. <http://dx.doi.org/10.24014/potensia.v6i1.8036>
- Nursyarief, A. (2014). Pendidikan Islam di Indonesia dalam lintasan sejarah (Perspektif Kerajaan Islam). *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 17(2), 256-271. <https://doi.org/10.24252/lp.2014v17n2a8>
- Sya'adah, A., Saputra, B. A., Jannah, M., & Mahfud, C. (2019). Sejarah reformasi pendidikan Islam di Indonesia. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 38-46. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v8i1.1793>